BAB IV

PEMERKOSAAN

DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA DALAM ISLAM

A. Pemerksaan dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Kejahatan pemerksaan bukan suatu jenis kejahatan yang baru. Ia sama tua usianya dengan keberadaan kehidupan manusia. Pemunculannya tidak saja dalam masyarakat modern, melainkan juga dalam masyarakat primitif.

Dewasa ini kejahatan pemerksaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Kajahatan tersebut tampaknya meningkat secara kuantitas, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

Kata perkosaan dalam kamus umum Bahasa Indonesia berasal dari kata “perkosa” artinya gagah, kuat, mendapat akhiran *-an* menjadi perkosaan artinya perbuatan memperkosa; penggagahan; paksaan; pelanggaran dengan kekerasan.¹

Sedangkan perkosaan menurut Z.G. Allen dan Charles F. Hemphill dalam bukunya *Basic criminal law* yang dikutip Made Darma Weda adalah: “*an act of sexual intercourse with a female resist and her resistance is overcome by force*”.² Arti dari pernyataan tersebut adalah: “Perbuatan pergaulan seksual dengan

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus*, 741.

² Made Darma Weda, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 70-71.

memaksa seorang perempuan dan perempuan tersebut mengadakan perlawanan dengan sekuat tenaganya”.

Perumusan itu menunjukkan bahwa si korban (wanita) tidak memberikan “*consent*” persetujuan. Perumusan ini tidak berbeda dengan pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal ini berbeda dengan pengertian perkosaan yang dikemukakan oleh Made Darma yang mengatakan bahwa perkosaan bukan hanya tidak adanya persetujuan dari si korban dan tidak hanya melalui vagina saja akan tetapi dapat pula melalui mulut dan anus.³

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerkosaan adalah pelanggaran terhadap hak manusia terutama kaum hawa yang dilakukan dengan pemaksaan dan bukan hanya melalui vagina tetapi juga melalui anus dan mulut.

Adapun landasan hukum pemerkosaan dalam hukum positif yakni hukum pidana dijelaskan pada buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bab XIV, yaitu pada pasal 285, 286, 287, 290 dan 291 (kejahatan kesusilaan). Sedangkan delik kesusilaan sendiri ada pada pasal 281-303 bis).

2. Klasifikasi

Setelah menjelaskan pengertian perkosaan, maka jenis-jenis perkosaan menurut Steven Box, dapat diklasifikasikan menjadi:

³ *Ibid.*

- a. "*sadistic rape*", yaitu pemerkosaan yang dilakukan secara sadistik. Si pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena bersetubuh, tetapi karena perbuatan kekerasan terhadap "*genitalia*" dan tubuh si korban;
- b. "*anger rape*", merupakan ungkapan pemerkosaan yang karena kemarahan dilakukan dengan sifat brutal secara fisik. Seks menjadi senjatanya dan dalam hal ini tidak diperolehnya kenikmatan seksual. Yang dituju acapkali keinginan untuk mempermalukan si korban;
- c. "*domination rape*", yaitu pemerkosaan yang dilakukan oleh mereka yang ingin menunjukkan kekuasaannya, misalnya majikan yang memperkosa bawahannya.
- d. "*seduction-turned-into-rape*", yaitu perkosaan yang ditandai dengan adanya relasi antara pelaku dengan korban;
- e. "*exploitation rape*", merupakan jenis pemerkosaan dimana si wanita sangat bergantung dari si pelaku, baik dari sosial maupun ekonomi. Acapkali terjadi dimana si isteri dipaksa oleh si suami.⁴

Sedangkan menurut penulis klasifikasi pemerkosaan didasarkan pada klasifikasi hukuman-hukuman yang dikenakan bagi para pemerkosa, yaitu pemerkosaan yang dilakukan di luar perkawinan dan perkosaan yang dilakukan di dalam perkawinan dan dalam kesempatan ini penulis hanya membahas tentang perkosaan yang dilakukan di luar perkawinan yakni perkosaan terhadap wanita-wanita yang bukan isterinya.

⁴ *Ibid.*, 72-73.

3. Unsur-unsur

Unsur-unsur dari delik perkosaan adalah sebagai berikut:

a. Barangsiapa

Sebagaimana pakar berpendapat bahwa “*barangsiapa*” bukan merupakan unsur, hanya memperlihatkan si pelaku (*dader/doer*) adalah manusia. Sebagian pakar lagi berpendapat bahwa “*barangsiapa*” tersebut adalah manusia, tetapi perlu diuraikan manusia siapa dan berapa orang. Jadi identitas “*barangsiapa*” tersebut harus jelas.⁵

Menurut penulis “*barangsiapa*” adalah manusia sesuai dengan kata “*siapa*” adalah ditujukan untuk benda yang berakal dan yang tepat untuk istilah tersebut adalah manusia. Jadi “*barangsiapa*” merupakan unsur dan untuk mengetahui apakah manusia tersebut dewasa atau tidak, sehat jasmani dan rohani atau gila?. Karena hukum tidak akan membebani bagi orang yang hilang ingatan sebagaimana hadits

الأصل في الذمة البراءة

“*Bahwa pada dasarnya manusia itu bebas dari beban/tanggungannya kepada orang lain.*”⁶

b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Pasal 89 KUHP memperluas pengertian “*kekerasan*” sehingga memingsankan atau melemahkan orang, disamakan dengan melakukan kekerasan.

⁵ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1998), 152.

⁶ Masjufuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, (Jakarta: Haji masagung, 1990), 121.

“Kekerasan atau ancaman kekerasan” tersebut ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga berbuat lain tidak memungkinkan baginya selain membiarkan dirinya untuk disetubuhi.

c. Memaksa

“Memaksa” berarti di luar kehendak dari wanita tersebut atau bertentangan dengan kehendak wanita itu sehingga menimbulkan rasa takut.

d. Seorang wanita bersetubuh dengan dia

Kalau bukan wanita (dalam hal homoseks) maka tidak dapat diterapkan pasal 285 KUHP.

Jadi pengertian “bersetubuh” pada saat ini diartikan bahwa penis telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina.

e. Di luar perkawinan (bukan isterinya)

Dengan gencarnya “hak asasi manusia” maka telah banyak orang berpendapat agar unsur ini dihapuskan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan suami terhadap isteri. Namun sampai saat ini, belum ada kesatuan pendapat. Di Indonesia, hal tersebut belum pernah dipermasalahkan karena anggapan bahwa melayani si suami merupakan kewajiban dan kebahagiaan tersendiri bagi isteri.⁷

4. Sanksi Pemerksaan

Hukuman bagi pemerksa sesuai dengan pasal-pasal dalam KUHP. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut adalah:

⁷ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, 52-53.

Pasal 285

Barangsiapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.⁸

Pasal 286

Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, padahal diketahuinya bahwa perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.⁹

Pasal 287

- (1) Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, padahal diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup lima belas tahun, kalau tidak terang berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum pantas untuk dikawini, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan, kalau ada pengaduan, kecuali kalau umur perempuan itu belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal tersebut pada pasal 291 dan 294.¹⁰

Pasal 290

Dipidana dengan pidana selama-lamanya tujuh tahun:

- Ke-1 Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
- Ke-2 Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya, atau patut dapat disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau umur itu tidak terang, bahwa orang itu belum pantas dikawini.
- Ke-3 Barangsiapa membujuk seseorang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa umur itu belum cukup lima belas tahun atau kalau umur itu tidak terang, bahwa ia belum pantas untuk dikawini, untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul, atau untuk berzina dengan orang lain.¹¹

Pasal 291

- (1) Kalau salah satu perbuatan yang diterangkan dalam pasal 286, 287, 289 dan 290 itu berakibat luka berat, dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

⁸ Sugandhi, *KUHP.*, 302.

⁹ *Ibid.*, 303.

¹⁰ *Ibid.*, 304.

¹¹ *Ibid.*, 306.

- (2) Kalau salah satu perbuatan yang diterangkan dalam pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 itu berakibat matinya orang, dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.¹²

Jadi hukuman bagi pemerkosa, yaitu:

- a. Dua belas tahun, apabila :
- 1) Memaksa seseorang yang bukan isterinya dan dengan disertai kekerasan (pasal 285 KUHP).
 - 2) Memaksa seseorang bukan isterinya dan menyebabkan luka-luka berat (pasal 291 (1) KUHP).
- b. Sembilan tahun, apabila :
- 1) Memaksa seseorang bukan isterinya dan wanita tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (pasal 286 KUHP).
 - 2) Memaksa seorang bukan isterinya padahal diduga wanita tersebut umurnya belum lima belas (pasal 287 (2) KUHP).
- c. Lima belas tahun, apabila mengakibatkan kematian bagi korban (pasal 291 (2) KUHP).

Dari uraian klasifikasi di atas, yang dibahas oleh penulis terbatas hanya pada pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana saja yaitu perkosaan yang dilakukan dengan kekerasan.

¹² *Ibid.*, 307.

B. Perkosaan dalam Perspektif Hukum Pidana dalam Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Dalam hukum pidana Islam perkosaan tidak disebutkan secara jelas, hanya saja kalau melihat dari segi unsur-unsur perkosaan tersebut, dimana dalam perbuatan perkosaan adanya unsur persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan, maka perbuatan bersetubuh yang dilakukan di luar perkawinan dalam Islam disebut dengan istilah zina.

Adapun pengertian zina menurut Ibnu Rusyd, adalah setiap persetubuhan yang bukan terjadi karena nikah yang sah dan bukan karena pemilikan.¹³

Peristiwa perkosaan ini terjadi di zaman khalifah Umar bin Khattab, dimana ada seorang hamba milik khalifah telah menzinai seorang perempuan sehingga perempuan tersebut pecah keperawanannya akibat paksaan. Maka dalam hal ini khalifah Umar bin Khattab menghukum laki-laki yang telah melakukan perkosaan tersebut dengan jalan menderanya dan membuangnya atau memenjarakannya dan tidak mengenakan hukuman bagi perempuan yang telah diperkosanya.¹⁴

Adapun dasar hukum diharamkannya zina terdapat pada al-Qur'an Surat al Mukminun ayat 5-7, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْتَابِهِمْ نَضُّونَ ۚ
وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْتَابِهِمْ نَضُّونَ ۚ
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ۖ فَآئِنَهُمْ مِنْهَا
غَيْرَ مُلْتَمَسِينَ ۗ

¹³ Imam Ghozali Said, dkk. (Ed.), *Terjemah Bidayatul Mujatahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 231.

¹⁴ Haliman, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), 185-186.

فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَادُونَ

— ٢٠٧-٢٠٥ —

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela, barangsiapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”

Bahkan tidak zinanya saja yang haram, melainkan mendekatinya pun haram, sebagaimana difirmankan Allah dalam Surat al Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Di samping itu Rasulullah saw, bersabda:

اجْتَنِبُوا الْقَاذِرَاتِ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا فَمَنْ
الْمَنْهَا بِشَيْءٍ فَلَيْسَتْ بِسِتْرِ اللَّهِ وَلَيْتَبُّ إِلَى
اللَّهِ فَإِنَّهُ مِنْ يَدِنَا صَفْحَتَهُ نَقَمَ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ

“Jauhilah oleh kalian perbuatan yang kotor ini, yang telah dilarang Allah. Barangsiapa yang terjerumus ke dalamnya maka hendaknya tutupi dengan tutup (Agama) Allah dan bertobatlah kepada Allah. Sesungguhnya siapa yang menampakkannya kami akan berlakukan atasnya kitab (ketentuan) Allah.”¹⁵(HR. Al Hakim dan al Baihaqi dari Ibnu Umar).

¹⁵ Suwarta Wijaya, dkk (Ed.), *Terjemah Asbabul Wurud I*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1991),

2. Klasifikasi

Pelaku zina diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah yakni perawan atau jejaka (*ghoiru muhshan*), dan zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah yaitu suami atau isteri (*muhshan*).

3. Unsur-unsur

Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan zina, tetapi mereka sepakat dalam dua unsur zina, yaitu:

- a. Wathi haram, yaitu wathi pada faraj wanita bukan isterinya atau hambanya dan masuknya zakar itu seperti masuknya ember ke dalam sumur dan tetap dianggap zina meskipun ada penghalang antara dzakar dan farajnya selama penghalang itu tidak menghalangi kenikmatan.
- b. Sengaja atau ada itikad jahat, yaitu apabila ia melakukan perzinaan dan ia tahu bahwa perzinaan itu haram.¹⁶

4. Sanksi Pemerkosaan

Hukuman bagi pemerkosaa dalam hukum pidana Islam disamakan dengan zina, hanya saja yang mendapat hukuman adalah salah satu pihak yakni pemerkosaa, yaitu:

¹⁶ A. Djazuli, *Fiqh*, 36.

- a. Seratus kali dera, apabila dilakukan oleh orang yang belum menikah, seperti yang tercantum dalam surat an Nur ayat 2, yang berbunyi:

الرَّانِيَةَ وَالزَّانِيَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ
بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿النور: ٢﴾ -

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka derahlah tiap-tiap seorang dari mereka seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu dari menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman yang mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.” (QS. an Nur:2).

- b. Dirajam atau hukuman mati dengan dilempari batu, apabila dilakukan oleh orang yang sudah menikah.

Alasan ulama yang mengatakan cukup dengan dirajam adalah karena Rasulullah merajam Ma'iz dan Ghamidiyah dan merajam seorang Yahudi dan tidak ada nash yang menyatakan bahwa beliau menjilid mereka lebih dahulu. Disamping itu berdasarkan prinsip bahwa hukuman yang berat itu menyerap hukuman yang ringan. Dan pendapat ini dipegangi oleh Jumhur.